

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI KECAMATAN IBU SELATAN

**DEVANTY CIMBERLY KENO
FLORENCE D. J. LENGKONG
JERICHO D. POMBENGI**

Summary: Planning is the first and most vital stage of development. Development planning is the main determinant of successful development that will be done within a country. Good planning and maturation will give birth to good results as well. Therefore, in development planning must involve all parties in it not as objects but as subjects in the implementation of development. In planning the development of the very need of public participation.

Participation is a bridge between government policy and the interests of the community, so that regional planning should be done with a bottom-up model or so-called participatory planning. Participatory planning is planning that aims to involve the interests of the people, and in the process involves the people (both direct and indirect) but in reality the planning itself is still mostly done from the top (top down planning). This study aims to determine how the level of community participation in development planning. This research was conducted in Kecamatan Ibu Selatan Halmahera Barat District. The research uses descriptive method with qualitative approach. Based on the results of interviews that have been done shows that community participation in development planning is still in the form of ideas and thoughts of ideas and suggestions. Need to do a deeper socialization to the community, so that the community is more active in the development planning that will be done in the future.

Keywords. Society participation

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia sebagian besar berada di pedesaan, oleh karena itu perhatian pembangunan perlu lebih banyak diarahkan kepada pembangunan pedesaan. Titik tumpu pembangunan tidak bisa lain kecuali pada pembangunan desa dengan segala aspeknya. Keadaan yang demikian ini diperkuat oleh adanya kenyataan bahwa masyarakat pedesaan masih dihindangi masalah sosial seperti kemiskinan, keterbelakangan dan berbagai kerawanan sosial lainnya. Untuk itu diperlukan suatu usaha yang terencana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial masyarakat desa serta guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung oleh peneliti terdapat beberapa masalah adalah sebagai berikut:

1. Program perencanaan partisipatif, yaitu dalam pembuatan program-program pemerintah kecamatan, masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan program pembangunan, sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahui program pemerintah kecamatan. Sehingga sebagian masyarakat yang tidak mau mengikuti program pemerintah dalam hal kerja bakti masyarakat lebih memilih pergi ke kebun dibandingkan untuk mengikuti kerja bakti.
2. Pembangunan jalan setapak, pada saat pembangunan jalan setapak di desa sebagian besar masyarakat tidak mau terlibat dalam

pekerjaan pembuatan jalan setapak, ada sebagian masyarakat mengatakan kalau pemerintah tidak membayar dengan upa yang tinggi mereka tidak mau bekerja.

3. Perencanaan pembangunan ketika pembangunan pelebaran jalan sebagian masyarakat tidak mau memberikan tanah untuk pelebaran jalan, masyarakat menginginkan dengan pembayaran yang tinggi.
4. Kurangnya partisipasi masyarakat hal ini disebabkan karena hubungan antara pemerintah kecamatan dengan sebagian kepala desa hubungan tidak terlalu baik, dan hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat juga hubungannya tidak terlalu baik. Hal ini karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kecamatan dan pemerintah sangat minim, karena pemerintah kecamatan dan pemerintah seringkali tidak melaksanakan rapat tahunan dan tidak ada pertanggungjawaban selama setahun.

Dari latar belakang di atas dianggap perlu untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Partisipasi

Kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "participation" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (John M. Echols & Hasan Shadily, 2000). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil –hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010).

B. Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009).

Mac Iver dan Page (dalam Soerjono Soekanto 2006), memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok

C. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan (Menurut Conyers (1994), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat

guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal . Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

D. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi Negara atau daerah bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Sjafrizal (2016)

E. Konsep Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Perencanaan pembangunan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik langsung maupun tidak langsung). Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat yang pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan dalam perencanaan pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (bottom up approach). Arifin Nasution (2007)

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Wawancara

Deskripsi hasil wawancara sebagaimana dikemukakan bahwa salah satu badan yang mempunyai peran penting dalam perencanaan pembangunan adalah badan

perencanaan pembangunan daerah yang dibentuk setiap daerah otonomi sebagai mana hasilnya di Kecamatan Ibu Selatan

Dimana badan inilah yang akan membantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah serta pelaksanaannya. Untuk mengetahui bagaimana badan perencanaan pembangunan daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah maka dilakukan wawancara kepada informan.

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Kecamatan Ibu Selatan sudah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, hal ini dapat kita lihat pemerintah kecamatan ibu selatan telah melakukan musrembang tingkat dusun, desa dan kecamatan. dan pada saat musrembang masyarakat juga ikut terlibat dalam proses perencanaan pembangunan yaitu dengan memberikan saran/usul dalam program program. Namun dalam proses perencanaan masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi seperti lemahnya fungsi pengawasan dan minimnya sosialisasi pemerintah kecamatan terhadap program-program kepada masyarakat. Selain itu dari sisi waktu juga dikarenakan wilayah yang cukup jauh dan akses informasi yang masih minim.

Pembahasan

Fokus utama dalam penelitian ini ialah kajian partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif di kecamatan ibu selatan

Dalam proses perencanaan pembangunan masyarakat juga mempunyai hak dalam menentukan akan pembangunan kecamatan bahkan desa, yakni dengan memberikan saran/usul dalam perencanaan pembangunan, masyarakat juga mempunyai

fungsi mengontrol akan kebijakan pemerintah baik pemerintah kecamatan bahkan pemerintah desa, masyarakat bebas menilai akan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah demi dan untuk kepentingan bersama

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan partisipatif di pemerintah kecamatan ibu selatan belum sepenuhnya masyarakat dilibatkan, hal ini disebabkan karena minimnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang belum optimal dan pengawasan yang kurang berkompeten dalam menjalankan fungsinya. Proses pembangunan dari segi biaya sudah efisien namun dari segi waktu belum maksimal, hal ini disebabkan karena sebagian wilayah yang belum terkomodir. Dan minimnya koordinasi antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, dan berdampak pada minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka disarankan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan partisipatif di kecamatan ibu selatan perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat.
2. perlunya peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Fifudin. 2012. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung: Alfabeta.
- Abe. A. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Atik. C. B. 2009. Sosiologi Kontektual. Jakarta: Mediatama.
- Conyers. D. 1994. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Satori. D. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Emile. D. dan Djuretnaa I. M. 1994. Moral dan Religi. Yogyakarta: Kanisius.
- Echols. J. M. dan Hassan. S. 2000. Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Emile. D. dan Soleman B. T. 1984. Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan. Jakarta: RaJawali.
- Fasli. J. dan Dedi. S. 2001. Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: Adicita.
- Faisal. 1980. Sosiologi Pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional.
- H.A. R. Tilaar. 2009. Kekuasaan Pendidikan Kajian Manajemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.
- I Nyoman. S. 2010. Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama.
- Kartasasmita. 1997. Pemberdayaan Masyarakat Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat. Yogyakarta: UGM
- Kartasasmita. 1996. Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo